



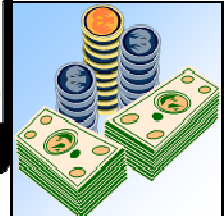
No. Publikasi : 13012.10.01

Katalog BPS : 4102004.1301

Bappeda : bappeda-10.02

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tahun 2009



Kerjasama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

dengan

Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Kepulauan Mentawai

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2009

No. Publikasi / *Publication Number* : 13012.10.01

Katalog BPS / *BPS Catalogue* : 4102004.1301

Bappeda : Bappeda – 10. 02

Ukuran Buku / *Book Size* : 21 cm x 28 cm

Jumlah Halaman / *Total Pages* : 62 Halaman / *Pages*

Naskah / *Manuscript* :

BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai

BPS – Statistics of Kepulauan Mentawai Regency

Gambar Kulit / *Cover Design* :

BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai

BPS – Statistics of Kepulauan Mentawai Regency

Diterbitkan oleh / *Published by* :

BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai dan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai,

Tuapejat-Sipora

BPS – Statistics of Kepulauan Mentawai Regency and

Regional Development and Planning Board of Kepulauan Mentawai Regency,

Tuapejat-Sipora

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami menyambut terbitnya buku “*Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009*”. Dimana buku ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memberikan hasil yang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu.

Buku “*Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009*” menyajikan data statistik pembangunan yang merupakan kesinambungan data tahun-tahun yang lalu. Dengan demikian dapat dijadikan bahan bagi dinas/SKPD/instansi untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang lebih penting lagi adalah sebagai bahan acuan dalam mengambil kebijaksanaan dan perencanaan untuk tahun-tahun yang akan datang.

Dengan terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta tidak lupa kepada semua pihak yang telah ikut membantu terbitnya buku “*Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009*”.

Demikian semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Tuapeijat, Agustus 2010
Bupati Kepulauan Mentawai,

EDISON SALELEUBAJA

KATA PENGANTAR

Publikasi “ Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009” merupakan publikasi tahunan hasil kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2009 ini disajikan informasi antara lain: Kependudukan, Keluarga Berencana, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Perumahan serta Pengeluaran dan Konsumsi Rumahtangga.

Adapun tujuan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai ini disamping untuk bahan evaluasi program pembangunan yang telah dijalankan juga sebagai kerangka dasar dalam menyusun dan merencanakan kebijakan di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini, disampaikan ucapan terima kasih. Untuk peningkatan dan penyempurnaan publikasi berikutnya, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Tuapeijat, Agustus 2010

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
KEPALA,

BADAN PUSAT STATISTIK
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
KEPALA,

D. LUBIS, SE, MM
NIP. 19630713 1998031001

RIZAL, SST
NIP. 196012311982031085

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab. I Penduduk	1 – 10
Bab. II Pendidikan	11 – 23
Bab. III Kesehatan dan Balita	24 – 31
Bab IV Ketenagakerjaan	32 – 41
Bab V Perumahan dan Komunikasi	42 – 50
Bab VI Pengeluaran dan Konsumsi	41 – 55

BAB I. KEPENDUDUKAN



1.1 Jumlah Penduduk

1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

1.3 Komposisi Penduduk

1.4 Status Perkawinan

1.5 Umur Perkawinan Pertama

1.6 Tingkat Kelahiran/Fertilitas

1.7 Keluarga Berencana

1.8 Indikator Kemiskinan Penduduk

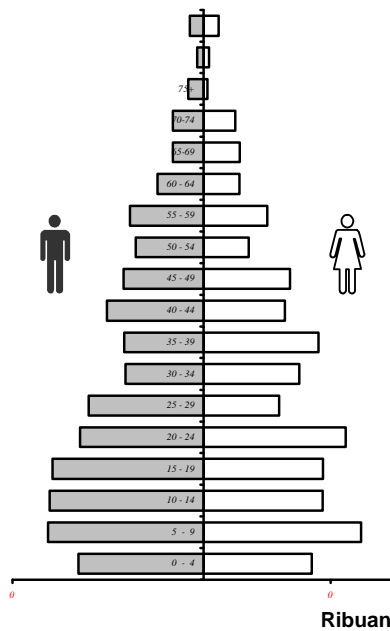
Penduduk merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Penduduk dengan jumlah yang besar merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi suatu daerah terutama penduduk yang berkualitas dan produktif bagi pembangunan nasional. Proses dan kegiatan pembangunan penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena bukan saja berperan sebagai pelaksana tapi juga menjadi sasaran pembangunan sendiri. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian penduduk tapi juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk yang besar disadari hanya akan merupakan beban pembangunan jika kualitasnya rendah. Oleh karena itu permasalahan jumlah penduduk yang besar haruslah diimbangi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia itu sendiri, baik peningkatan kualitas dari segi pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, maupun kesejahteraan masyarakat secara umum.

1.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,69 persen dari 69.011 jiwa pada tahun 2008 menjadi 70.174 jiwa. Jika dilihat proporsi penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penduduk provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebanyak 4.827.970 jiwa, terdapat sekitar 1,46 persen adalah merupakan penduduk kabupaten Kepulauan Mentawai.

Gambar 1.1
Piramida Penduduk
Kabupaten Ke. Mentawai
tahun 2009



Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2009 tercatat 1,69 persen. Nilai ini lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai pada tahun 2008 yang tercatat sebesar 2,67 persen.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2009

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	4.842	3.735	8.577
5-9	4.746	3.748	8.494
10-14	3.878	4.470	8.348
15-19	3.614	2.380	5.994
20-24	2.460	3.009	5.469
25-29	2.494	3.617	6.111
30-34	3.027	2.560	5.587
35-39	2.512	2.716	5.228
40-44	2.127	1.422	3.549
45-49	2.307	2.005	4.312
50-54	1.451	1.128	2.579
55-59	964	1.139	2.103
60-64	964	1.000	1.964
65-69	479	121	600
70-74	195	172	367
75 +	419	473	892
Jumlah	36.479	33.695	70.174

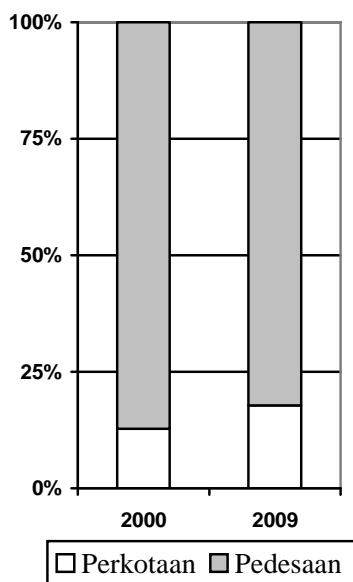
Sumber: Susenas 2009

1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan maka persebaran penduduk merupakan salah satu faktor yang menentukan. Terutama berhubungan dengan alokasi sumber daya manusia serta sasaran dan prioritas pembangunan.

Kepulauan Mentawai yang dihuni sekitar 1,46 persen dari total penduduk Sumatera Barat, dengan luas wilayah 6011.35 Km² atau sekitar 14,23 persen dari wilayah Sumatera Barat. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk di kabupaten ini relatif rendah yaitu hanya sekitar 12 orang per Km². Dibandingkan dengan tahun 2000 maka kepadatan penduduk Kepulauan

Gambar 1.2
Distribusi Penduduk
Menurut tempat tinggal



Mentawai mengalami peningkatan dari 10,13 jiwa per Km² menjadi 11,67 jiwa per Km².

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk (per Km²)
Tahun 2000 dan 2009

Tahun	Kab. Kep. Mentawai
(1)	(2)
2000	10,13
2009	11,67

Sumber : SP 2000 dan Susenas 2009

Kemudian dari Tabel 1.3 dapat dilihat persebaran penduduk antar wilayah pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2000 penduduk yang tinggal di daerah perkotaan hanya 12,75 persen, sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 17,8 persen. Selain menunjukkan persebaran penduduk yang lebih baik perubahan tersebut juga memperlihatkan kenaikan tingkat urbanisasi di kabupaten ini. Dari tahun ke tahun laju pergerakan urbanisasi yang semakin tinggi ini ditandai semakin banyaknya masyarakat di daerah pedesaan yang pindah dan tinggal di daerah perkotaan.

Tabel 1.3 Persentase Penduduk Menurut Tempat Tinggal
Tahun 2000 dan 2009

Tahun	Perkotaan	Pedesaan
(1)	(2)	(3)
2000	12,75	87,25
2009	17,80	82,20

Sumber : SP 2000 dan Susenas 2009

1.3 Komposisi Penduduk

Selain jumlah penduduk, komposisi atau struktur penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur juga penting untuk diperhatikan. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2009 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Jika dihitung sex rasionya mencapai 108,26

yang berarti jumlah penduduk laki-laki 8,26 persen lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Uraian (1)	Banyaknya (2)
Laki-Laki	36.479
Perempuan	33.695
Sex Ratio	108,26

Sumber: Susenas 2009

Kemudian jika dilihat menurut kelompok usia maka sebagian besar penduduk Kepulauan Mentawai berusia diantara 15 - 64 tahun. Baik untuk penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan sekitar 61,13 persen berusia produktif dan sebanyak 38,87 persen adalah non produktif

Tabel 1.5 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.

Kel. Umur (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
0 – 14	36,91	35,47	36,22
15 – 64	60,09	62,25	61,13
65 +	3,00	2,27	2,65

Sumber: Susenas 2009

Komposisi penduduk menurut usia tersebut dapat dilihat tingkat ketergantungan (*dependency ratio*). Secara keseluruhan tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 63,59 (persentase seluruh penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif), angka tersebut berarti dari tiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 63 orang penduduk tidak produktif.

Jika dibedakan menurut umur maka dalam 63 orang penduduk usia tidak produktif tersebut terdiri dari 59 orang usia muda (0-14 tahun) dan 4 orang usia tua (>65 tahun).

1.4 Status Perkawinan

Salah satu karakteristik penduduk yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi adalah status perkawinan. Dalam sensus atau survei yang dilaksanakan BPS, penduduk dengan status kawin didefinisikan sebagai penduduk yang berada dalam ikatan perkawinan baik secara hukum adat, agama, negara dan sebagainya, maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat dianggap sebagai suami istri.

Tabel 1.6 Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, Tahun 2000 dan 2009

Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000				
Laki-laki	42,24	55,41	0,78	1,57
Perempuan	32,17	61,42	1,41	5,00
2009				
Laki-laki	39,03	57,58	1,55	1,84
Perempuan	30,11	61,80	1,84	6,24

Sumber : SP 2000 dan Susenas 2009

Dari hasil Sensus Penduduk tahun 2000 dan Susenas tahun 2009 memperlihatkan hasil tidak jauh berbeda dalam persentase penduduk menurut status perkawinan. Pada tahun 2000, persentase penduduk yang kawin lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang belum kawin, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dengan tahun 2009, hanya saja persentase jumlah penduduk perempuan berstatus kawin lebih besar dari persentasi penduduk laki-laki berusia 10 tahun keatas dengan status kawin. Hal ini sangat wajar mengingat secara total jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan yang digambarkan dengan *sex ratio* diatas 100. Hal ini juga bisa diartikan kesadaran dari penduduk laki-laki untuk tidak menikah cepat lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jika dibedakan antara laki-laki dan perempuan maka tampak

bahwa persentase perempuan yang belum kawin lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

1.5 Umur Perkawinan Pertama

Penduduk Perempuan berusia 10 tahun ke atas yang pernah melakukan perkawinan adalah sebesar 69,89 persen, dimana 15,54 persen melakukan perkawinannya pada usia yang relatif sangat muda yaitu usia 10 – 16 tahun. Kondisi ini cukup membutuhkan perhatian serius karena masih banyak perempuan yang sudah kawin di usia muda.

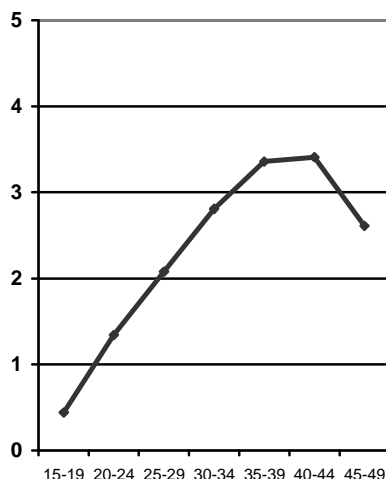
Hal tersebut perlu mendapat perhatian terutama jika dikaitkan dengan kesehatan reproduksi. Jika kelahiran dilakukan oleh ibu dengan usia muda maka resiko kematian ibu saat melahirkan relatif tinggi. Kemudian semakin besar proporsi penduduk yang menikah pada usia muda juga mengindikasikan semakin rendah tingkat pendidikan penduduk. Hal ini disebabkan banyak yang tidak melanjutkan sekolah karena memilih untuk menikah.

Tabel 1.7 Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Melakukan Perkawinan Menurut Umur Perkawinan Pertama

Umur Perkawinan Pertama	Persentase
(1)	(2)
10 – 16	15,54
17 – 18	29,02
19 – 24	43,82
25 +	11,62
Jumlah	100

Sumber : Susenas 2009

Gambar 1.3
Rata-rata ALH Menurut
Kelompok Umur



Di kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat 44,56 persen perempuan yang melakukan perkawinan dengan usia perkawinan pertama kurang dari atau sama dengan 18 tahun. Sedangkan 43,82 persen menikah pada usia 19 – 24 tahun dan sisanya 11,62 persen menikah pada usia 25 tahun ke atas.

Jika dikaitkan dengan program wajib belajar sembilan tahun, maka perlu menjadi perhatian bahwa 15,54 persen perempuan pernah kawin dan menikah pada umur diantara 10 - 16 tahun. Diduga mereka belum menamatkan SLTP atau hanya sampai pada tingkat pendidikan terakhir SD saja, karena untuk tamat SLTP biasanya berumur 15 tahun.

1.6 Tingkat Kelahiran/Fertilitas

Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah tingkat kelahiran. Ada beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kelahiran diantaranya adalah TFR (Total fertility Rate), ASFR (Age Spesific Fertility Rate), GRR (Gross Reproduction Rate), atau NRR (Net Reproduction Rate).

Tabel 1.8 Rata-Rata Anak Lahir Hidup Menurut Kelompok Umur Ibu, Tahun 2009

Kelompok Umur Ibu	Rata-Rata Anak Lahir Hidup
(1)	(2)
15 – 19	0,44
20 – 24	1,34
25 – 29	2,08
30 – 34	2,81
35 – 39	3,36
40 – 44	3,41
45 – 49	2,61
Rata-Rata Total	2,75

Sumber : Susenas 2009

Fertilitas dalam pengertian demografi menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran sangat tergantung pada beberapa faktor misalnya: struktur umur, tingkat pendidikan, umur perkawinan pertama, status pekerjaan perempuan, penggunaan alat kontrasepsi, dan pendapatan/kekayaan. Rata-rata anak lahir hidup setiap ibu di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 2,75 orang. Jika dikaitkan dengan program keluarga berencana yaitu cukup dua anak saja maka hal tersebut belum tercapai di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jika dibedakan menurut kelompok umur ibu maka semakin bertambah umur semakin tinggi pula rata-rata anak lahir hidup per ibu. Pada kelompok umur 15 – 19 tahun tercatat rata-rata sekitar 0,44 jiwa. Hal tersebut wajar saja mengingat mereka belum lama menjalani masa pernikahannya dan belum menyelesaikan masa reproduksinya. Kemudian untuk kelompok umur 45 – 49 tahun, yang bisa dianggap telah menyelesaikan masa reproduksi, rata-rata anak lahir hidupnya mencapai 2,61 jiwa.

1.7 Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah dibidang kependudukan adalah keluarga berencana. Program tersebut bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara membatasi tingkat kelahiran. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai 15,34 persen penduduk perempuan usia 15 – 49 tahun yang pernah menikah pernah memakai alat kontrasepsi dan 38,42 persen sedang menggunakannya, sedangkan sisanya 46,25 persen tidak pernah memakai alat kontrasepsi.

Dari informasi diatas perlu kiranya mendapat perhatian khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai mungkin dengan lebih intensif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat

terutama penduduk perempuan usia 15 – 49 tahun tentang pentingnya penggunaan alat KB sebagai salah satu cara untuk membatasi tingkat kelahiran.

Tabel 1.9 Persentase Wanita Berusia 15-49 tahun dan Berstatus Kawin menurut Alat/Cara KB yang digunakan, Tahun 2009

Alat/cara KB	Persentase Pemakai
(1)	(2)
MOW/vasektomi	0,74
MOP/Vasektomi	2,18
AKDR/IUD/spiral	0,74
Suntikan KB	55,22
Susuk KB/norplan/inplanon/alwalit	11,69
Pil KB	12,57
Kondom	0,72
Cara Tradisional	16,14
Jumlah	100

Sumber : Susenas 2009

Alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai adalah Suntikan KB yaitu mencapai 55,22 persen dari total perempuan berusia 15 –49 tahun yang berstatus kawin. Alat KB lainnya yang cukup banyak digunakan adalah cara tradisional, Pil KB & Susuk KB/IMPL (*Implantation*).

1.8 Indikator Kemiskinan Penduduk

Salah satu indikator dalam mengukur dan menentukan tingkat kemiskinan penduduk adalah batas-batas yang disebut dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung dari dua komponen yakni komponen makanan dan non makanan (perumahan, sandang pendidikan dll.)

Garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan hasil Susenas 2009 adalah Rp.165.814. Informasi ini dapat memberikan indikasi bahwa penduduk dikatakan miskin bila pendapatan dibawah Rp. 165.814,- perkapita perbulan. Dengan garis kemiskinan tersebut, didapatkan 20,54 persen

atau setara 14.414 jiwa penduduk Kepulauan Mentawai yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan data hasil PPLS 2008 dimana pendataan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rumah tangga sasaran maka terjadi ketimpangan yang cukup besar. Hasil PPLS 2008 didapatkan 95,86 % Rumah Tangga di Kepulauan Mentawai merupakan rumah tangga sasaran yang identik dengan rumah tangga miskin. Ketimpangan ini terjadi dimungkinkan dan dapat diduga bahwa karena dalam PPLS 2008, responden cenderung untuk menjadi miskin agar menjadi sasaran dari program-program yang diselenggarakan pemerintah. Terutama yang berkaitan dengan bantuan.

BAB II. PENDIDIKAN



2.1 Sarana Pendidikan

2.2 Angka Partisipasi Murni
& Angka Partisipasi Kasar

2.3 Partisipasi Sekolah

2.4 Tingkat Pendidikan yang
Ditamatkan

2.5 Tingkat Melek Huruf

Salah satu sasaran pembangunan adalah pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan meningkatkan kemampuan, memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan prioritas pembangunan, didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan dilandaskan nilai-nilai spiritual, moral, dan etik sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa serta keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai tujuan tersebut kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting, sehingga perlu dipersiapkan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan pembangunan di bidang pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas taraf hidup dan intelektual manusia.

2.1. Sarana Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk sangat ditentukan oleh sarana yang tersedia. Jumlah sarana pendidikan yang memadai dan kemudahan untuk mengaksesnya akan mendukung penduduk untuk menyelesaikan pendidikan sampai jenjang tertinggi.

Pada tahun 2009, di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 113 sekolah di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), terdiri dari 104 Sekolah Dasar Negeri, 8 Sekolah Dasar Swasta dan 1 Madrasah Ibtidaiyah. Jumlah murid yang bersekolah tersebut mencapai 14.127 orang dengan 567 orang tenaga pengajar/guru. Jumlah Sekolah tingkat pendidikan SLTP pada tahun 2009 adalah 21 sekolah, yang terdiri dari 14 SLTP Negeri, 4 SLTP Swasta dan 3 Madrasah Tsanawiyah.

Jumlah murid yang bersekolah tersebut mencapai 4.095 orang dengan tenaga pengajar/guru mencapai 282 orang. Sementara itu jumlah sekolah dengan tingkat pendidikan SLTA pada tahun 2008 adalah 7 sekolah, terdiri dari 5 SLTA Negeri, 1 SLTA Swasta dan 1 Madrasah Aliyah dengan tenaga pengajar/guru mencapai 226 orang dan murid sebanyak 2.291 orang.

Pada tahun 2009, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai kabupaten baru belum memiliki sarana pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Hal ini dapat menjadikan salah satu faktor penghambat untuk meningkatkan kualitas penduduk kabupaten kepulauan Mentawai.

Tabel 2.1 Jumlah Sekolah, Kelas dan Guru menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009

Tingkat Pendidikan	Jumlah		
	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	113	14.127	567
SLTP	21	4.095	282
SLTA	7	2.291	226

Keterangan : SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah, SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah, SLTA termasuk Madrasah Aliyah

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tabel 2.2 Rasio Murid Terhadap Sekolah dan Guru menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009

Tingkat Pendidikan	Rasio Murid Terhadap	
	Sekolah	Guru
(1)	(2)	(3)
SD	125,01	24,91
SLTP	195,00	14,52
SMU	327,28	10,13

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dari sarana yang ada dapat diketahui bahwa pada tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SMU rata-rata setiap sekolah memiliki murid masing-masing sekitar 125 murid, 195 murid, dan 327 murid.

Angka ini jelas mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain sarana yang memadai, hasil kualitas sumber daya manusia akan ditentukan oleh proses yang dijalani dalam pendidikan. Proses pendidikan akan berjalan baik jika interaksi antara murid dan guru lancar. Jumlah murid yang terlalu banyak dibimbing oleh seorang guru akan mempengaruhi kelancaran interaksi/ komunikasi antara guru dan murid.

Pada tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SMU masing-masing setiap guru akan menangani sekitar 25 murid, 15 murid, dan 10 murid. Hal ini berarti jumlah beban yang harus ditanggung oleh seorang guru dalam melakukan pendidikan dan pengajaran masih relatif kecil. Jika kita berpedoman pada hasil ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai kelebihan guru, karena standar rasio murid terhadap guru adalah 40 (Diknas). Namun jika kita berpatokan pada rasio guru terhadap kelas, kita akan mendapatkan kesimpulan yang jauh berbeda.

Tabel 2.3 Rasio Guru Terhadap Kelas menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009

Tingkat Pendidikan	Guru	Kelas	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	567	767	0,73
SLTP	282	134	2,10
SMU	226	90	2,51

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Rasio guru terhadap kelas untuk SD, SLTP dan SLTA se-Kabupaten Kepulauan Mentawai masing-masing adalah 0,73 untuk SD, 2,10 untuk SLTP, dan 2,5 untuk SLTA. Disini terlihat bahwa rasio guru terhadap kelas untuk semua tingkat pendidikan masih sedikit. Hal ini berarti Kabupaten Kepulauan Mentawai kekurangan guru jika dihitung berdasarkan proporsi guru terhadap kelas terutama untuk tingkat pendidikan SD.

Perbedaan hasil tersebut disebabkan karena kondisi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai itu sendiri, dimana terkadang 1 kelas hanya ada sedikit murid yang melakukan proses belajar mengajar (faktor jarak murid-sekolah), sedangkan di kelas harus ada guru yang mengajar tidak tergantung sedikit banyaknya murid yang diajar. Faktor geografis Kepulauan Mentawai yang sangat luas mengharuskan dibukanya banyak kelas meskipun jumlah murid sedikit agar murid lebih mudah mengakses pendidikan.

2.2. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator pendidikan nasional yang digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi murid yang bersekolah pada suatu tingkat pendidikan tertentu dalam kelompok usianya terhadap jumlah penduduk kelompok usia pendidikan tersebut, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator pendidikan nasional yang digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi murid yang bersekolah pada suatu tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia pendidikan tersebut. APM dan APK di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dapat dihitung untuk tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA dengan kelompok usia pendidikan untuk SD adalah 7 - 12 tahun, SLTP adalah 13 - 15 tahun dan untuk SLTA adalah 16 - 18 tahun. Sumber data yang digunakan adalah hasil pendataan Susenas 2009.

Tabel 2.4 Nilai APM dan APK Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009

Tingkat Pendidikan	APM	APK
(1)	(2)	(3)
SD	87,87	109,22
SLTP	58,20	78,97
SMU	45,49	58,25

Sumber : Susenas 2009

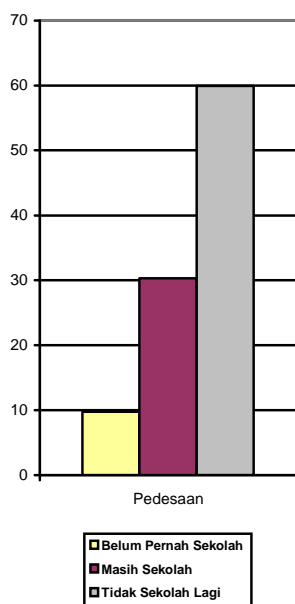
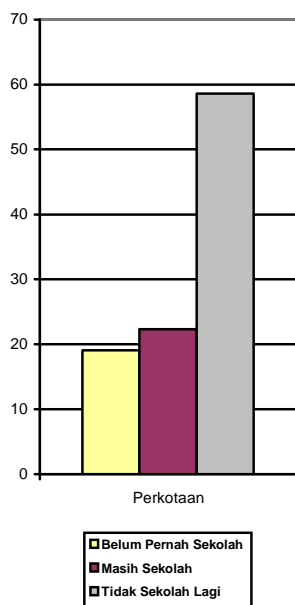
Berdasarkan tabel 2.4 diatas terlihat bahwa nilai APM Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tingkat pendidikan SLTP dan SLTA cukup rendah, yaitu 58,20 dan 45,49. Hal ini berarti hanya 58,20 persen dari jumlah penduduk usia pendidikan SLTP (13 – 15 tahun) yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan SLTP, sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTA, hanya 45,49 persen dari jumlah penduduk usia pendidikan SLTA (16 – 18 tahun) yang sedang bersekolah di SLTA. Sementara itu untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar, sudah sekitar 87,87 persen penduduk usia pendidikan SD (7 – 12 tahun) yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan SD.

Namun jika dilihat dari nilai APK, maka untuk tingkat pendidikan SD mempunyai nilai APK >100 dan jauh melampaui nilai APM itu sendiri. Jika dihubungkan dengan nilai APM, maka didapat kesimpulan bahwa jumlah murid sekolah SD melebihi jumlah penduduk pada kelompok usia pendidikan masing-masing sekolah. Hal ini terjadi karena masih banyaknya murid SD yang berusia diatas 12 tahun, atau belum genap berusia 7 tahun.

Kondisi yang sama juga terjadi pada tingkat pendidikan SLTA dengan nilai APK 54,20, yang berarti jumlah murid yang bersekolah di SLTA mencapai 54,20 persen jumlah penduduk usia pendidikan 16 – 18 tahun. Hal ini lebih disebabkan karena partisipasi murid yang lulus SLTP untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan masih cenderung rendah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi minimnya nilai APM & APK untuk tingkat SLTP dan SLTA adalah lokasi sekolah setingkat SLTP dan SLTA yang tidak terdapat di semua wilayah. Hal ini menyebabkan jarak yang harus di tempuh murid untuk menuju sekolah menjadi jauh.

Gambar 2.1
Persentase Penduduk 5
Tahun Keatas Menurut
Tempat Tinggal dan
Partisipasi Sekolah



2.3. Partisipasi Sekolah

Penduduk berusia 5 tahun keatas di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagian besar sudah tidak sekolah lagi yaitu mencapai 59,69 persen. Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang masih sekolah adalah 28,92 persen.

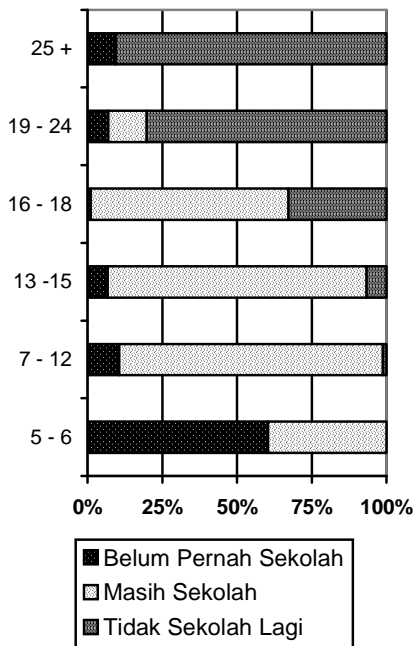
Jika dilihat menurut daerah pedesaan dan perkotaan maka tampak hanya sedikit perbedaan terutama pada kategori penduduk yang belum pernah sekolah. Di daerah perkotaan yang belum pernah sekolah mencapai 19,07 persen sedangkan di daerah pedesaan penduduk yang belum pernah sekolah hanya 9,77 persen. Sedangkan untuk penduduk yang masih sekolah di daerah perkotaan memiliki persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan penduduk di daerah pedesaan.

Tabel 2.5. Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Tempat tinggal, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah Tahun 2009

Tempat tinggal/ Jenis Kelamin	Blm pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Laki-laki	18,68	17,73	63,60
Perempuan	19,46	26,87	53,67
Total	19,07	22,32	58,61
Pedesaan			
Laki-laki	9,12	30,80	60,08
Perempuan	10,50	29,77	59,74
Total	9,77	30,31	59,92
Kep. Mentawai	11,39	28,92	59,69

Sumber : Susenas 2009

Gambar 2.2
Persentase Penduduk 5
Tahun Keatas Menurut
Kelompok Umur dan
Partispasi Pendidikan



Partispasi penduduk untuk sekolah sangat dipengaruhi oleh faktor usia. Pada usia yang sangat muda wajar saja jika penduduk belum sekolah. Permasalahan justru akan timbul jika penduduk dalam usia sekolah tetapi belum sekolah atau tidak sekolah lagi.

Tabel 2.6. **Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Partispasi Sekolah Tahun 2009**

Umur (tahun)	Blm pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
5 - 6	60,46	39,54	0,00
7 - 12	10,50	88,31	1,19
13 - 15	6,64	86,69	6,67
16 - 18	1,08	66,11	32,82
19 - 24	6,83	13,00	80,17
25 +	9,29	0,12	90,59
Jumlah	11,39	28,92	59,69

Sumber : Susenas 2009

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai 60,46 persen penduduk berusia 5 – 6 tahun belum pernah sekolah, dan sisanya 39,54 persen masih sekolah. Persentase penduduk yang belum pernah sekolah sangat besar dikarenakan usia masuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar berkisar antara 6 sampai 7 tahun. Untuk penduduk usia 7 – 12 tahun, persentase yang belum pernah sekolah hanya 10,50 persen dan sebagian besar yaitu 88,31 persen masih bersekolah, sedangkan sisanya hanya 1,19 persen yang tidak bersekolah lagi. Kemudian di kelompok umur pendidikan SLTP (13 – 15 tahun), masih ada lagi penduduk yang belum sekolah yakni 6,64 persen dan 6,67 persen penduduk sudah tidak bersekolah lagi. Dalam upaya melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, yang perlu mendapat perhatian adalah penduduk usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun yang belum pernah sekolah atau tidak bersekolah lagi.

Jika dibandingkan antara kelompok umur 16 – 18 tahun, 19 – 24 tahun dan 25 tahun ke atas tampak bahwa persentase penduduk yang belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi cenderung meningkat, sedangkan penduduk yang masih sekolah semakin menurun. Peningkatan persentase penduduk yang belum pernah sekolah tersebut mengindikasikan bahwa ada perbaikan dalam partisipasi penduduk jika dibandingkan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan menurunnya penduduk yang masih sekolah seiring dengan meningkatnya usia mungkin disebabkan makin bertambahnya usia maka makin beragam pula kegiatan dan tanggung jawabnya. Terutama bagi mereka yang sudah memasuki jenjang pernikahan. Khusus penurunan persentase penduduk yang masih sekolah dari kelompok umur 16 – 18 tahun ke 19 – 24 tahun mungkin disebabkan sarana pendidikan yang tidak mendukung. Pada umur 19 – 24 tahun seharusnya sudah menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi, tetapi fasilitas pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih terbatas dan belum bisa dinikmati oleh mayoritas penduduk pada usia tersebut.

Tabel 2.7. Persentase Penduduk Berusia 5 tahun ke atas yang Masih Bersekolah Menurut Tempat tinggal, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2009

Tempat tinggal/ Jenis Kelamin (1)	Tingkat Pendidikan				
	SD (2)	SLTP (3)	SMU (4)	DIII (5)	DIV/S1 (6)
Perkotaan					
Laki-laki	63,26	5,23	26,28	0,00	5,23
Perempuan	51,75	20,70	17,20	0,00	10,35
Total	56,30	14,58	20,79	0,00	8,33
Pedesaan					
Laki-laki	67,93	19,41	12,17	0,00	0,17
Perempuan	71,32	15,74	9,00	1,14	0,20
Total	69,51	17,71	10,70	0,53	0,19
Kep. Mentawai	67,73	17,29	12,06	0,46	2,46

Sumber : Susenas 2009

Ket : SD (termasuk Madrasah Ibtidaiyah)
SLTP (termasuk Madrasah Tsanawiyah)
SMU (termasuk Madrasah Aliyah dan SMK)

Kemudian dari tabel 2.5 terlihat penduduk 5 tahun ke atas yang masih sekolah, sebagian besar masih sekolah di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pada daerah perkotaan, persentase penduduk yang masih sekolah di tingkat SLTP dan SMU lebih besar daripada penduduk di pedesaan. Hal ini dikarenakan fasilitas pendidikan lanjutan dan menengah belum tersedia di daerah pedesaan. Namun kondisi sebaliknya justru terjadi untuk persentase jumlah penduduk yang berada di tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Persentasenya justru lebih besar di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan, dimana persentase jumlah penduduk berusia 5 tahun ke atas yang menjalani pendidikan Sekolah Dasar mencapai 69,31 persen, sedangkan di daerah perkotaan hanya 56,30 persen.

2.4. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk. Penduduk berusia 5 tahun ke atas di Kabupaten Kepulauan Mentawai mayoritas berpendidikan kurang dari SD dan Tamat SD masing-masing 54,50 persen dan 23,21 persen. Jadi hanya sedikit yang memiliki pendidikan tamat SLTP, SMU dan PT, yaitu masing-masing hanya 12,57 persen, 7,26 persen dan 2,17 persen.

Jika dibedakan menurut tempat tinggal maka tampak bahwa penduduk berusia 5 tahun ke atas di perkotaan memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dari pada daerah pedesaan. Di perkotaan penduduk dengan pendidikan SMU dan Perguruan Tinggi sudah cukup banyak yakni mencapai 14,87 persen dan 6,06 persen. Sedangkan di daerah pedesaan, hanya ada 6,01 persen yang tamatan SMU sederajat dan hanya 1,35 persen yang tamatan perguruan tinggi.

Tabel 2.8. Persentase Penduduk Berusia 5 tahun ke atas Menurut Tempat tinggal, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2009

Tempat tinggal/ Jenis Kelamin (1)	Tingkat Pendidikan				
	< SD (2)	SD (3)	SLTP (4)	SMU (5)	PT (6)
Perkotaan	56,26	11,63	11,18	14,87	6,06
Pedesaan	54,13	25,66	12,86	6,01	1,35
Laki-laki	52,68	22,63	14,86	7,44	2,40
Perempuan	56,49	23,85	10,06	7,69	1,92
Kep. Mentawai	54,50	23,21	12,57	7,56	2,17

Sumber : Susenas 2009

Kemudian jika dibedakan antara penduduk laki-laki dan perempuan maka tampak bahwa tingkat pendidikan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan cenderung bervariasi. Pada tingkat pendidikan kurang dari SD dan tamat SD serta tamat SMU persentase penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTP persentase penduduk laki-laki cenderung lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Sama halnya untuk tingkat Perguruan Tinggi (Diploma I,II,III,IV,S1,S2,S3), persentase penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.

Tingkat pendidikan penduduk berusia 5 tahun ke atas yang disajikan dalam Tabel 2.8 belum menggambarkan kondisi pendidikan akhir (final), karena dari penduduk berusia 5 tahun keatas tersebut terdapat 28,92 persen penduduk yang masih bersekolah. Jadi tingkat pendidikan penduduk yang ditamatkan bisa lebih baik dimasa datang.

Kemudian jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan menurut kelompok umur dari penduduk berusia 5 tahun ke atas maka terlihat indikasi peningkatan pendidikan penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal tersebut dapat dilihat dari penduduk berusia 25 tahun keatas dengan pendidikan tidak tamat SD tidak mencapai separoh jumlah penduduk yakni hanya mencapai 45,74 persen,

sedangkan untuk kelompok umur yang lebih muda (16-18 tahun) hanya 15,12 persen. Kemudian untuk tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SMU persentase kelompok umur 19 - 24 tahun cenderung lebih besar daripada kelompok umur 25 tahun ke atas.

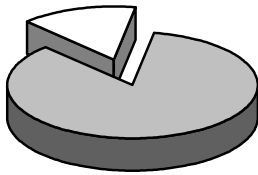
Tabel 2.9. Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur Dan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan, Tahun 2009

Kelompok Umur (1)	Tingkat Pendidikan				
	< SD (2)	SD (3)	SLTP (4)	SMU (5)	PT (6)
5 – 6	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- 12	99,55	0,45	0,00	0,00	0,00
13 – 15	35,39	61,31	3,31	0,00	0,00
16 – 18	15,12	30,72	53,08	1,08	0,00
19 – 24	32,88	21,34	23,34	21,08	1,37
25 +	45,74	28,25	12,46	9,77	3,78
Kep. Mentawai	54,50	23,21	12,57	7,56	2,17

Sumber : Susenas 2009

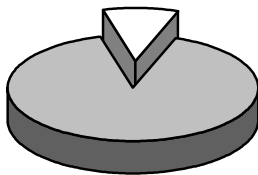
Untuk kelompok umur 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun, dan 16-18 tahun persentase di Tabel 2.7 diatas belum menggambarkan kondisi akhir, karena jumlah penduduk usia 5 tahun keatas yang masih bersekolah pada rentang usia pendidikan tersebut masing-masing mencapai 88,31 persen, 86,69 persen, dan 66,11 persen. Sedangkan pada kelompok umur pendidikan 5-6 tahun sebanyak 60,46 persen belum memasuki jenjang pendidikan. Kondisi tersebut berbeda dengan kelompok umur 19-24 tahun dan 25 tahun keatas yang sebagian besar sudah menyelesaikan pendidikannya/tidak bersekolah lagi, yaitu mencapai 80,17 persen dan 90,59 persen.

Gambar 2.3
Persentase penduduk 5
Tahun Ke atas Menurut
Kemampuan Membaca di
Perkotaan



□ Mampu Membaca □ Buta Huruf

Gambar 2.4
Persentase penduduk 5
Tahun Ke atas Menurut
Kemampuan Membaca di
Pedesaan



□ Mampu Membaca □ Buta Huruf

2.5. Tingkat Melek Huruf

Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan selain melalui bangku pendidikan adalah melalui kemampuan membaca. Dengan membaca diharapkan memperluas dan membuka wawasan seseorang. Jadi kemampuan membaca dapat dijadikan salah satu ukuran untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagian besar penduduk berusia 5 tahun ke atas telah mampu membaca. Hanya sebagian kecil yang buta huruf.

Tabel 2.10. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca, Tahun 2009

Tempat tinggal/ Jenis Kelamin	Mampu Membaca			Buta Huruf
	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Perkotaan				
Laki-laki	82,25	11,23	1,88	14,02
Perempuan	79,62	10,22	0,00	15,74
Total	80,93	10,73	0,93	14,88
Pedesaan				
Laki-laki	88,35	8,66	2,24	9,86
Perempuan	87,16	9,37	2,01	9,84
Total	87,79	9,00	2,13	9,85

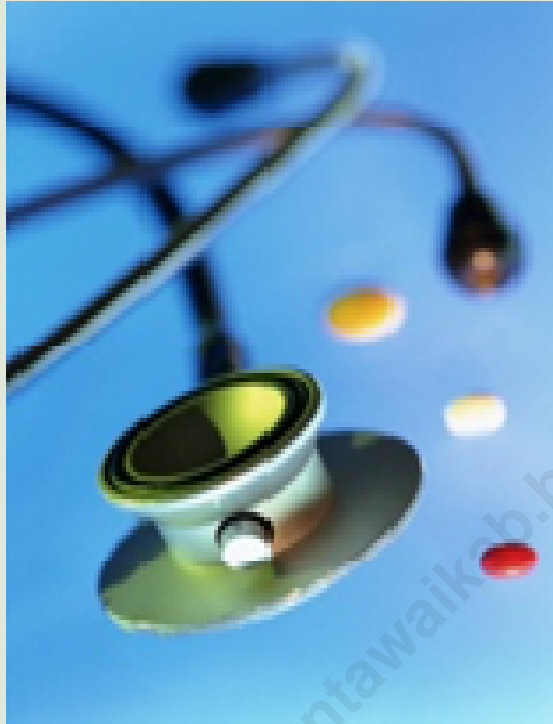
Sumber : Susenas 2009

Berdasarkan tabel 2.10 diatas, jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang tinggal di pedesaan dengan kondisi buta huruf atau tidak mampu membaca mencapai 9,85 persen atau hampir satu dari sepuluh penduduk pedesaan tidak mampu membaca atau buta huruf. Kondisi ini tentunya relatif sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2008, dimana persentase penduduk pedesaan yang masih buta huruf mencapai 16,93 persen.

Sementara itu kondisi buta huruf untuk penduduk di daerah perkotaan relatif jauh lebih besar daripada penduduk pedesaan, yaitu sebesar 14,88 persen. Jika dilihat dari jenis kelamin, buta huruf untuk laki-laki relative sama dengan perempuan yakni berkisar 14 persen untuk di perkotaan dan 9 persen untuk di pedesaan.

<http://mentawai.kab.bps.go.id>

BAB III. KESEHATAN & BALITA



<http://mentawaikeb.bps.go.id>

3.1 Keluhan Utama Gangguan

Kesehatan

3.2 Kesehatan Balita

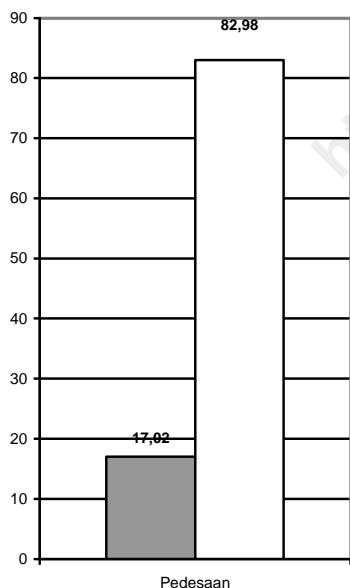
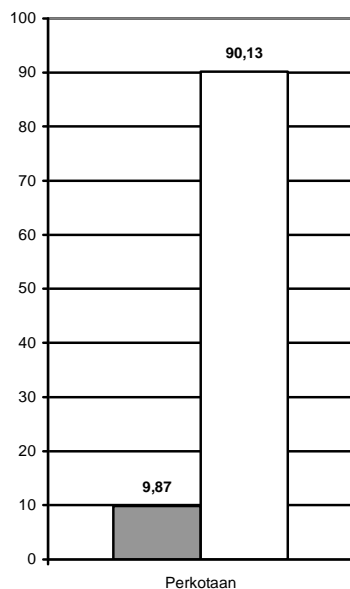
Tingkat kesehatan penduduk berkaitan dengan tingkat kesejahteraannya, sehingga pembangunan dibidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan dibidang kesejahteraan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2005, pembangunan kesehatan diarahkan untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas, kemudahan, dan pemerataan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan keadaan gizi, membudayakan sikap hidup bersih dan sehat, didukung dengan pembangunan perumahan dan pemukiman yang layak, aman serta lingkungan hidup yang sehat.

Kondisi kesehatan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Seperti diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kondisi fisik dan non fisik. Secara langsung kondisi fisik seseorang akan ditentukan oleh tingkat kesehatannya. Sedangkan kondisi non fisik seperti tingkat intelektual, kemampuan bersosialisasi atau pengendalian emosi juga akan dipengaruhi oleh kondisi kesehatan. Sehingga keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan bidang lainnya.

3.1. Keluhan Utama Gangguan Kesehatan

Banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menggambarkan kondisi kesehatan yang kurang baik. Dari hasil Susenas 2009, di Kabupaten Kepulauan Mentawai 17,02 persen penduduknya mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir sebelum masa pencacahan, dimana terjadi peningkatan persentase yang cukup signifikan, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2008, dimana persentase penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang

Gambar 3.1
Persentase Penduduk
Menurut tempat Tinggal
dan Keluhan Kesehatan



mengalami gangguan kesehatan pada tahun 2008 hanya 7,43 persen. Hal ini berarti terjadi penurunan kondisi kesehatan yang cukup signifikan di masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jika melihat tabel 3.1 dibawah ini penurunan kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut disebabkan karena pengaruh penurunan persentase kondisi kesehatan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan yang mencapai 8,33 persen dan 10,19 persen dari tahun 2008. Oleh karena itu perlu perhatian lebih khusus dari Dinas/Instansi terkait setempat untuk lebih memfokuskan peningkatan sarana prasarana kesehatan di daerah pedesaan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Menurut Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Keluhan Kesehatan, Tahun 2009

Tempat tinggal/ Jenis Kelamin (1)	Mengalami Keluhan Kesehatan			
	2008		2009	
	Ya (2)	Tidak (3)	Ya (4)	Tidak (5)
Perkotaan				
Laki-laki	4.76	95.24	10,20	89,80
Perempuan	0.83	99.17	9,48	90,52
Total	1.54	98.46	9,87	90,13
Pedesaan				
Laki-laki	39.31	60.69	24,78	75,22
Perempuan	7.87	92.13	23,48	76,52
Total	13.97	86.03	24,16	75,84
Kep. Mentawai	7.43	92.57	17,02	82,98

Sumber : Susenas 2009

Jika dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan maka persentase penduduk pedesaan yang mengalami keluhan kesehatan justru lebih banyak dibanding daerah perkotaan. Di perkotaan hanya 9,87 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, sedangkan di daerah pedesaan mencapai 24,16 persen. Ini menunjukkan masyarakat di daerah perkotaan lebih menerapkan pola hidup sehat selain didukung juga dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Untuk daerah pedesaan dan perkotaan, persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan jauh lebih kecil daripada penduduk laki-laki.

Jika dibandingkan dengan tahun 2008, kondisi kesehatan masyarakat diperkotaan umumnya jauh lebih buruk.

Jika dilihat menurut jenis penyakit yang menjadi keluhan, secara umum pilek menjadi keluhan terbanyak yakni sebesar 15,14 persen disusul batuk dan panas, masing-masing sebesar 14,11 persen dan 10,72 persen. Sementara untuk penyakit asma hanya 1,53 persen penduduk Kepulauan Mentawai yang mengalaminya yang semuanya berada di wilayah pedesaan. Begitu juga halnya dengan diare yang hanya dialami oleh penduduk yang berada di wilayah pedesaan.

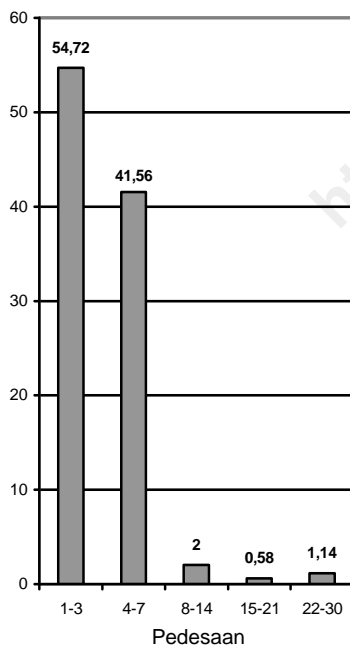
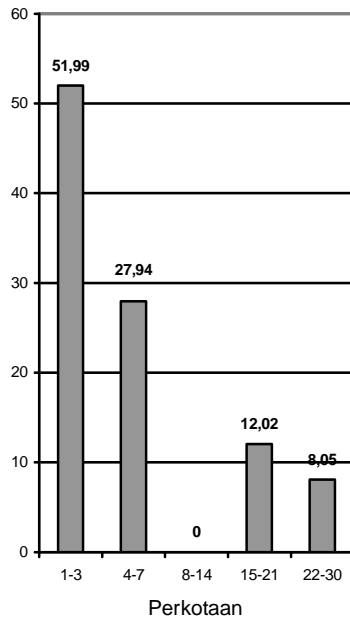
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Penyakit, Tahun 2009

Jenis Penyakit	Mengalami Keluhan Kesehatan		
	Perkotaan	Pedesaan	Kep. Mentawai
(1)	(2)	(3)	(3)
Panas	5,52	11,84	10,72
Batuk	3,55	16,40	14,11
Pilek	5,93	17,14	15,14
Asma	0,00	1,86	1,53
Diare	0,00	3,85	3,17
Sakit Kepala	5,55	7,58	7,22
Sakit Gigi	0,79	7,29	6,14

Sumber : Susenas 2009

Jika di tinjau lebih jauh antara penduduk di perkotaan dengan di pedesaan terlihat adanya perbedaan pola jenis penyakit yang menjadi gangguan. Selain Asma dan Diare yang hanya terjadi di pedesaan, Batuk lebih banyak dialami oleh penduduk pedesaan, lebih besar daripada panas sedangkan di daerah perkotaan panas lebih banyak daripada batuk. Sakit gigi juga lebih banyak dialami oleh masyarakat pedesaan.

Gambar 3.2
Persentase Penduduk
Berdasarkan Lama Hari
Terganggu Kesehatan



Gangguan kesehatan yang dialami oleh penduduk dapat mengurangi tingkat produktifitas penduduk. Dari jumlah penduduk yang pernah mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir sebanyak 77,15 persen diantaranya merasa terganggu pekerjaan, sekolah atau kegiatan sehari-harinya. Kondisi ini jauh lebih meningkat dibandingkan tahun 2008, dimana sebanyak 40,86 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tersebut merasa terganggu pekerjaan, sekolah atau kegiatan sehari-harinya.

Tabel 3.3 **Persentase Penduduk Yang mengalami keluhan Kesehatan Menurut Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Lama Hari terganggu, Tahun 2009**

Tempat tinggal/ Jenis Kelamin	Lama Hari Terganggu Kesehatan				
	1-3 (1)	4-7 (2)	8-14 (3)	15-21 (4)	22-30 (5)
Perkotaan					
Laki-laki	42,81	42,81	0,00	0,00	14,38
Perempuan	63,65	9,04	0,00	27,31	0,00
Total	51,99	27,94	0,00	12,02	8,05
Pedesaan					
Laki-laki	50,85	44,91	2,12	1,07	1,04
Perempuan	59,23	37,65	1,86	0,00	1,25
Total	54,72	41,56	2,00	0,58	1,14

Sumber : Susenas 2009

Jika dilihat dari Tabel 3.3, maka sebagian besar penduduk terganggu selama 1 - 3 hari. Di daerah perkotaan penduduk yang terganggu 1 - 3 hari mencapai 51,99 persen, sedangkan di pedesaan cenderung sama yaitu 54,72 persen. Untuk penduduk yang lamanya terganggu 4 - 7 hari mencapai 27,94 persen di perkotaan dan 11,56 persen di pedesaan.

3.2 Kesehatan Balita

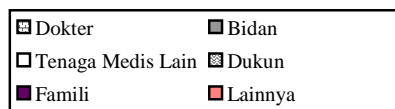
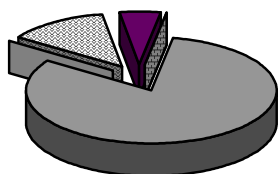
Kondisi kesehatan balita merupakan hal penting untuk diperhatikan mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa di masa datang. Kondisi kesehatan dan kecukupan gizi balita saling berhubungan. Terpenuhinya kebutuhan gizi balita dengan baik, merupakan salah satu faktor yang mendukung terjaganya kesehatan, sedangkan kondisi kesehatan yang baik juga mempengaruhi penyerapan nutrisi yang dikonsumsi oleh balita

Dalam kondisi sosial ekonomi yang buruk, balita berpeluang besar untuk terganggu kesehatannya dan pemenuhan kebutuhan gizinya. Kekurangan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, apalagi pada masa pertumbuhan mempunyai dampak yang sangat besar. Misalnya kekurangan yodium dan zat besi (Fe) akan mengakibatkan daya pikir yang lemah. Jika kondisi tersebut dibiarkan terjadi meluas maka Bangsa Indonesia akan kekurangan SDM yang berkualitas di masa datang.

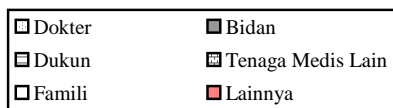
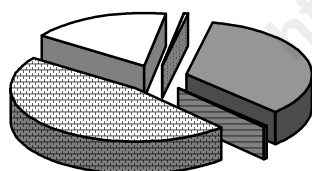
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat adalah angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*), tingkat mordibitas, angka kematian kasar, atau angka kematian menurut kelompok umur. Angka Kematian Bayi sering digunakan sebagai indikator karena sifatnya yang sensitif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi misalnya: umur ibu saat melahirkan, kondisi kesehatan ibu, jarak kelahiran antar anak, kontrol kesehatan saat hamil serta penolong persalinan. Dalam Tabel 3.4 disajikan data mengenai penolong persalinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dari hasil Susenas 2009.

Gambar 3.3
Persentase Balita
Menurut Penolong
Persalinan di Perkotaan



Gambar 3.4
Persentase Balita
Menurut Penolong
Persalinan di Pedesaan



Tabel 3.4 **Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran**
Pertama dan Tempat Tinggal, Tahun 2009

Penolong Kelahiran	Tempat Tinggal		
	Pertama	Perkotaan	Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Dokter	0,00	0,53	0,42
Bidan	81,60	34,29	43,82
Tenaga Medis Lain	0,00	0,53	0,42
Dukun	13,16	46,48	39,77
Famili/Keluarga	5,24	18,17	15,57
Lainnya	0	0	0
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2009

Persalinan yang dianggap aman atau memenuhi standar kesehatan terutama bagi ibu dan anak yang dilahirkan adalah persalinan pertama yang ditolong dokter, bidan, atau tenaga medis lainnya. Jadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya 44,66 persen persalinan yang aman. Sisanya 39,77 persen ditolong oleh dukun dan 15,57 persen oleh famili/keluarga. Persentase persalinan yang aman pada tahun 2009 ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008 (34,21 persen). Hal ini berarti kesadaran masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan persalinan yang aman pada tahun 2009 cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Jika dibedakan antara daerah pedesaan dan perkotaan maka tampak perbedaan yang jelas. Di perkotaan 81,60 persen persalinan ditolong oleh bidan, sedangkan di pedesaan yang ditolong oleh bidan hanya 34,29 persen. Persalinan di pedesaan paling banyak ditangani oleh dukun yaitu mencapai 46,48 persen. Sementara itu kepercayaan masyarakat diperkotaan terhadap dukun dalam melakukan persalinan mencapai 13,16 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Dinas/Instansi terkait setempat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pemerataan tenaga medis kesehatan, khususnya di daerah-daerah pedesaan.

Usia di bawah lima tahun merupakan masa pertumbuhan baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan otak. Otak, organ penting yang berkaitan dengan kecerdasan, tumbuh sangat cepat saat kehamilan. Otak segera terbentuk setelah pembuahan. Saat lahir otak bayi telah tumbuh mencapai 25 persen dari otak dewasa. Kemudian di usia satu tahun otak bayi telah tumbuh 70 persen dari otak dewasa serta mencapai 90 persen di usia tiga tahun. Jadi dapat diketahui betapa pentingnya kesehatan dan kecukupan gizi balita, karena berpengaruh terhadap masa depannya

Untuk mencapai pertumbuhan yang optimal dibutuhkan kecukupan gizi yang baik. Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang cocok bagi bayi, karena ASI tidak hanya membuat bayi kenyang tetapi kandungan nutrisinya membantu otak berkembang optimal. Beberapa fakta telah membuktikan bahwa bayi akan tumbuh lebih sehat dan cerdas jika diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. ASI eksklusif berarti diberikan ASI tanpa makanan tambahan lainnya seperti susu formula, madu, bubur nasi, atau buah-buahan.

Tabel 3.5 Persentase Balita Menurut Lamanya Disusui dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2009

Lamanya Disusui (Bulan)	Daerah Tempat Tinggal		Jumlah
	Perkotaan	Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 5	0,00	4,41	3,50
6 - 11	7,86	7,75	7,77
12 - 17	26,27	29,83	29,09
18 - 23	21,14	14,92	16,21
24 +	44,73	43,08	43,42
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2009

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai 43,42 persen balita disusui selama lebih dari 24 bulan. Yang perlu diperhatikan disini adalah masih ada balita yang disusui selama kurang dari 6 bulan yaitu 3,50 persen. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kurang optimalnya pertumbuhan balita dan tentu saja berpengaruh terhadap penurunan kesehatan dan kecerdasan balita.

Jika dibedakan berdasarkan daerah tempat tinggal perkotaan dan pedesaan maka terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan terutama pada 6 bulan dan 1 tahun pertama lamanya disusui. Tidak terdapat balita disusui selama kurang dari 6 bulan di daerah perkotaan sedangkan di daerah pedesaan terdapat 4,41 persen. Sementara itu persentase balita disusui selama 6 s/d 11 bulan di daerah perkotaan mencapai 7,86 persen dan 7,75 persen di daerah pedesaan.

Tabel 3.6 Persentase Balita Menurut Lamanya Disusui ASI Saja dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2009

Lamanya Disusui ASI saja (Bulan)	Daerah Tempat Tinggal		Jumlah
	Perkotaan	Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 5	20,97	45,27	40,25
6 - 11	71,11	47,53	52,40
12 - 17	5,24	3,87	4,15
18 - 23	0,00	2,78	2,20
24 +	2,68	0,56	1,00
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber : Susenas 2009

Tabel 3.6 memperlihatkan data mengenai persentase balita menurut lamanya disusui ASI saja berdasarkan daerah tempat tinggal. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sebanyak 40,25 persen balita di Kabupaten Kepulauan Mentawai diberi ASI saja (ASI Eksklusif) selama kurang dari 6 bulan, sedangkan persentase balita yang diberi ASI Eksklusif selama 6 sampai 11 bulan hanya 52,40 persen.

BAB IV. KETENAGAKERJAAN



4.1 Komposisi Tenaga Kerja

4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

4.3 Status Pekerjaan Utama

4.4 Tingkat Pengangguran

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan dimensi ekonomi.

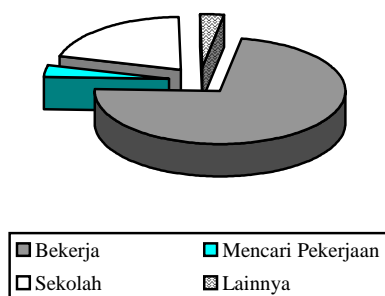
Dilihat dari dimensi sosial, pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Sedangkan dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

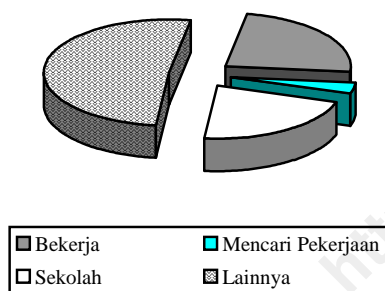
4.1 Komposisi Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk yang secara potensial berperan dalam memproduksi barang dan jasa. Oleh karenanya untuk dapat menggambarkan potensi penduduk dalam menghasilkan output suatu daerah diperlukan adanya data ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan di daerah seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta produktivitas tenaga kerja. Untuk dapat menggambarkan keadaan ketenagakerjaan sangat dibutuhkan data yang dapat dipercaya dan cukup terperinci mengenai karakteristik tenaga kerja. Salah satunya adalah data yang dihasilkan oleh BPS melalui sensus dan survei.

Gambar 4.1
Persentase Penduduk
Laki-Laki 10+ Menurut
Kelompok Kerja



Gambar 4.2
Persentase Penduduk
Perempuan 10+ Menurut
Kelompok Kerja



Selama ini, dalam kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan dilapangan, BPS menggunakan batasan umur untuk penduduk usia kerja pada penduduk 10 tahun keatas, yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun keatas yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang mengurus rumahtangga (RT), sekolah, dan lainnya.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk 10 + Menurut Kelompok Kerjadan Jenis kelamin, Tahun 2009

Jenis Kelamin	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sekolah	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	72,68	3,78	20,42	3,12
Perempuan	24,02	3,25	21,52	51,21
Total	48,66	3,52	20,97	26,86

Sumber : Susenas 2009

Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2009 adalah 48,66 persen yaitu terdiri dari 72,68 persen penduduk laki-laki dan 24,02 persen penduduk perempuan. Persentase total penduduk yang bekerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini memperlihatkan peningkatan persentase yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2008 (40,96 persen), yaitu meningkat sebesar 7,70 persen. Pada tahun 2008, hanya 10,42 persen penduduk perempuan yang bekerja, sedangkan pada tahun 2009 mencapai 24,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk perempuan untuk bekerja sudah semakin baik. Penduduk perempuan tergerak untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit.

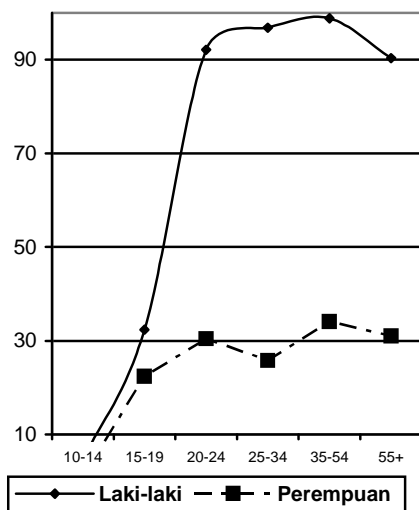
Dari tabel 4.1, terlihat bahwa jumlah penduduk usia 10 tahun keatas menurut kegiatan utama relatif masih besar pada kelompok bukan angkatan kerja yaitu mencapai 47,83 persen, terdiri dari 20,97 persen yang masih sekolah dan 26,86 persen kegiatan lainnya seperti mengurus rumah tangga dan sebagainya. Dilihat dari jenis kelamin, lebih dari separuh penduduk perempuan (51,21 persen) di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berusia lebih 10 tahun mempunyai kegiatan utama lainnya, dan ini didominasi oleh kegiatan mengurus rumah tangga.

4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Indikator yang dapat menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan perekonomian adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK menunjukkan keterlibatan penduduk dalam kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor demografi seperti umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal (desa/kota), pendapatan dan agama. Pengaruh faktor-faktor tersebut berbeda menurut jenis kelamin. Pada TPAK laki-laki pada faktor tersebut tidak begitu besar, sebab pada umumnya laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga hampir semua laki-laki yang telah mencapai usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan pada TPAK perempuan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini berkaitan dengan fungsi pokok mereka untuk melaksanakan tugas rumahtangga, melahirkan dan membesarkan anak. Akibatnya TPAK wanita terlihat tidak begitu dominan bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki dan

Gambar 4.3
TPAK Menurut
Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin



secara keseluruhan sangat berbeda jika dilihat dari kelompok umur.

Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut
Jenis Kelamin, Tahun 2007 - 2009

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	72,68	24,02	48,66
2008	74,98	12,21	43,50
2007	87,09	12,91	43,61

Sumber : Susenas 2009

Pada tabel 4.2, Dari TPAK di Kabupaten Kepulauan Mentawai diatas terlihat penduduk laki-laki lebih aktif melakukan kegiatan ekonomi bila dibandingkan dengan penduduk perempuan, keadaan ini terlihat dari TPAK laki-laki 3 kali TPAK perempuan yaitu 72,68 persen TPAK penduduk laki-laki dan 24,02 persen TPAK penduduk perempuan dengan TPAK Kabupaten mencapai 48,66 persen.

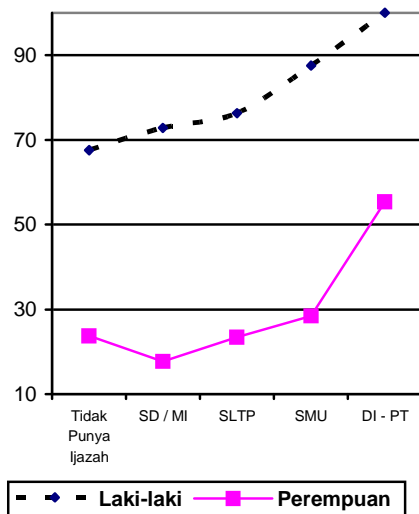
Tabel 4.3 TPAK Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin Tahun 2009

Kelompok Umur	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
10 – 14	4,54	0,89	2,62
15 – 19	32,37	22,40	28,49
20 – 24	92,11	30,47	58,71
25 – 34	96,80	25,77	59,88
35 – 54	98,84	34,09	69,32
55 +	90,31	31,03	62,17

Sumber : Susenas 2009

TPAK menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, secara umum TPAK penduduk laki-laki masih jauh lebih tinggi dari pada TPAK penduduk perempuan. Pada kelompok umur 10-14 tahun baik laki-laki maupun perempuan, TPAK-nya masih sangat rendah, karena pada kelompok umur tersebut sebagian besar masih berada di bangku sekolah.

Gambar 4.3
TPAK Menurut Ijazah
Tertinggi Yang di Miliki
dan Jenis Kelamin



Pada kelompok umur 15-19 tahun, TPAK mulai menunjukkan peningkatan yang berarti (laki-laki 32,37 persen dan perempuan 22,40 persen) karena pada kelompok usia ini baik laki-laki maupun perempuan sudah mulai mendapatkan pekerjaan dikarenakan ada dari mereka yang sudah tidak sekolah lagi.

TPAK laki-laki mencapai tingkat partisipasi tertinggi pada kelompok umur 35–54 tahun sebesar 98,84 persen pada perempuan tingkat partisipasi tertinggi juga pada kelompok umur 35–54 tahun yakni sebesar 34,09 persen. TPAK perempuan menunjukkan peningkatan untuk setiap kelompok umur, mulai dari kelompok umur 15-19 tahun sampai pada puncaknya pada kelompok umur 38-54 tahun kecuali pada kelompok umur 25 – 34 tahun, hal ini dikarenakan perempuan pada umur tersebut masih dalam masa reproduksi sehingga mempengaruhi untuk bekerja atau tidak. Pada kelompok umur 55+ TPAK perempuan mulai mengalami penurunan.

Tabel 4.4 TPAK Menurut Ijazah Tertinggi Yang di Miliki dan Jenis kelamin, Tahun 2009

Tingkat Pendidikan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah	67,57	23,72	45,38
SD / MI	72,86	17,74	45,82
SLTP/MTSN	76,30	23,44	56,10
SMU/MAN/SMK	87,52	28,43	58,82
D.1 - PT	100,00	55,38	81,17

Sumber : Susenas 2009

Jika dilihat (tabel 4.4) dari ijazah tertinggi yang dimiliki, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang akan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam angkatan kerja. Pada Tabel 4.4, TPAK menurut ijazah tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tingkat partisipasi tertinggi

adalah pada tamatan D1 – Perguruan Tinggi, yaitu 81,17 persen, dimana untuk penduduk laki-laki dengan tamatan D1- Perguruan Tinggi TPAK mencapai 100 persen. Hal ini berarti semua penduduk laki-laki lulusan D1 - Perguruan Tinggi sudah bekerja.

Pada umumnya tingkat kesempatan kerja untuk penduduk yang berpendidikan, lebih besar bila dibandingkan dengan tingkat pendidikan dibawahnya. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, partisipasi angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan pada penduduk yang tidak punya ijazah cukup tinggi (45,38 persen), hal ini mungkin disebabkan karena lapangan pekerjaan paling banyak di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sektor pertanian yang tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi. Kondisi ini justru memerlukan perhatian lebih lanjut oleh Dinas/Instansi terkait setempat, mengingat masih tingginya jumlah penduduk angkatan kerja dengan tingkat pendidikan dibawah Sekolah Dasar.

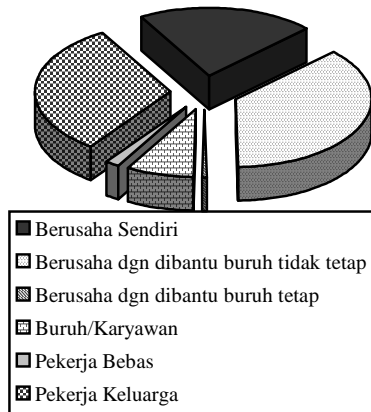
Tabel 4.5 TPAK Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009

Status Perkawinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	37,81	14,88	28,17
Kawin	97,53	24,38	60,78
Cerai	94,52	62,00	72,03

Sumber : Susenas 2009

Pada umumnya, tingkat partisipasi penduduk untuk masuk dalam pasar kerja meningkat setelah melakukan perkawinan terutama untuk laki-laki, karena laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarganya. TPAK untuk penduduk dengan status kawin di Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 60,78 persen dan status cerai sebesar 72,03 persen. Sedangkan TPAK terendah pada penduduk yang berstatus belum kawin sebesar 28,17 persen.

Gambar 4.4
Persentase Penduduk
yang bekerja Menurut
Status Pekerjaan Utama



4.3. Status Pekerjaan Utama

Indikator lain yang juga dapat menggambarkan tentang ketenagakerjaan yaitu melihat dari sudut status pekerjaan. BPS mengklasifikasi status pekerjaan ke dalam 6 (enam) bagian yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dengan dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas dan pekerjaan keluarga.

Tabel 4.6 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis kelamin, Tahun 2009

Status Pekerjaan	Jenis kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	24,18	17,17	21,19
Berusaha dgn dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	47,84	22,34	36,98
Berusaha dgn dibantu buruh tetap/dibayar	0,44	0,52	0,47
Buruh/Karyawan/Pegawai	9,43	6,03	7,98
Pekerja Bebas	1,75	1,38	1,59
Pekerja keluarga/tidak dibayar	16,37	52,56	31,79

Sumber : Susenas 2009

Dari tabel 4.6 terlihat, bahwa penduduk yang bekerja/berusaha sebagai pengusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar paling dominan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu mencapai 36,98 persen, lalu diikuti oleh pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 31,62 persen, sedangkan status penduduk yang berusaha sendiri mencapai 31,79 persen dan yang berusaha sendiri sebesar 21,19 persen. Sementara yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai hanya sebesar 7,98 persen. Dilihat dari sisi jenis kelamin, secara umum penduduk laki-laki dominan berusaha/bekerja dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Tabel 4.7 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan, Tahun 2009

Lapangan Usaha	Status Pekerjaan					
	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	85,08	93,56	53,55	6,24	78,74	93,70
Pertambangan dan Penggalian	0,53	0,00	0,00	1,76	0,00	0,35
Perdagangan	1,84	4,19	0,00	1,72	0,00	4,11
Angkutan	1,81	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00
Jasa	8,90	0,74	46,45	64,15	0,00	1,13
Lainnya	1,83	1,50	0,00	20,24	21,26	0,71

Sumber : Susenas 2009

Keterangan Status Pekerjaan :

1. Berusaha sendiri,
2. Berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap,
3. Berusaha dengan dibantu buruh tetap
4. Buruh/Karyawan/Pegawai,
5. Pekerja Bebas,
6. Pekerja keluarga/tidak dibayar.

Seperti terlihat pada tabel 4.7, lapangan usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi oleh sektor Pertanian untuk semua status pekerjaan penduduk. Sektor Pertanian ini meliputi Subsektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. Penduduk yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 85,08 persen dan 93,56 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja disektor ini sebagai buruh/karyawan hanya 6,24 persen. Sebaliknya penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan lebih banyak bekerja di sektor jasa yaitu 64,15 persen. Sementara itu pekerja keluarga/tidak dibayar justru dominan pada sektor pertanian yaitu 93,70 persen.

4.4. Tingkat Pengangguran

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Permasalahan tersebut sangat terkait dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kesempatan kerja/usaha yang sedikit.

Oleh karenanya berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dan membuka kesempatan kerja seluas mungkin untuk dapat menurunkan tingkat pengangguran di masa yang akan datang.

Indikator yang biasa digunakan untuk melihat tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan proporsi penduduk yang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja.

Tabel 4.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis kelamin, Tahun 2008

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	4,94	11,91	6,74
2008	4.29	14.68	5.84
2007	8.35	41,24	12,60

Sumber : Susenas 2009

TPT di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebesar 6,74 persen, yang berarti sebanyak 6,74 persen dari angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang mencari pekerjaan. Dilihat dari jenis kelamin, TPT laki-laki di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4,94 persen jauh lebih rendah dari TPT perempuan (11,91 persen). Dari kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga laki-laki lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada perempuan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2008, TPT dalam Angkatan Kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan sebesar 1,10 persen. Jika dilihat dari jenis kelaminnya maka peningkatan TPT terjadi pada penduduk laki-laki sedangkan pada perempuan TPT malah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB V. PERUMAHAN & KOMUNIKASI



5.1 Kualitas Tempat Tinggal

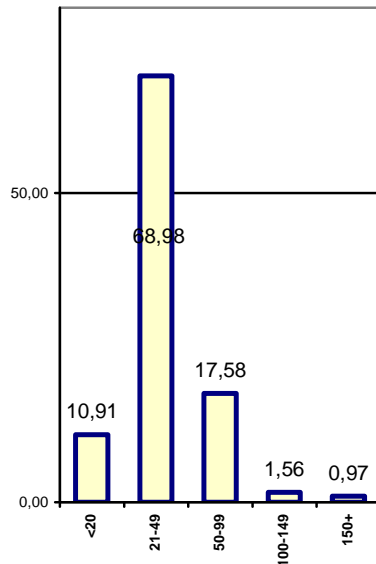
5.2 Sumber Air Minum dan Fasilitas
Lainnya

5.3 Listrik, Komunikasi, dan
Informasi

Disamping kebutuhan pokok lain seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan, perumahan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang vital dalam kehidupan. Rumah dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Pada saat ini rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai tempat tinggal bagi manusia. Rumah yang baik tentunya rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan, lokasi rumah yang dekat dengan fasilitas sosial seperti sekolah, puskesmas, pasar dan tempat rekreasi. Selain itu dapat memberikan rasa nyaman bagi penghuninya. Tentunya semakin baik kualitas rumah yang dimiliki oleh penduduk menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan bagi penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijakan pemerintah di bidang perumahan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara mengadakan dan meningkatkan mutu fisik dan fasilitas lingkungan perumahan termasuk bentuk, ukuran type dan bahan bangunan yang digunakan. Kebijakan ini berhadapan dengan faktor-faktor yang ada dalam masyarakat seperti pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, kemampuan masyarakat yang terbatas dan biaya pembangunan perumahan yang semakin besar.

Gambar 5.1
Persentase RT Menurut
Luas Lantai



Pemukiman merupakan bagian penting di dalam usaha pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan produktivitas, dengan penyediaan kebutuhan masyarakat akan perumahan yang sehat, air yang bersih dan lingkungan yang sehat serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Untuk menggambarkan kualitas perumahan dan lingkungan, BPS menggunakan pendekatan rumah tangga yang menempati suatu bangunan.

5.1. Kualitas Tempat Tinggal

Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif luas sehingga penghuninya tidak berdesakan. Hal ini didasarkan pada anggapan adanya hubungan yang erat antara luas rumah yang ditempati dengan status sosial ekonomi rumahtangga tersebut. Semakin tinggi status sosial ekonominya, makin luas lantai rumah yang ditempatinya. Variabel yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas tempat tinggal diantaranya adalah luas lantai hunian, jenis dinding terluas, jenis atap terluas dan status penguasaan tempat tinggal.

Tabel 5.1 **Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Hunian Tahun 2009**

Luas Lantai (m ²)	Persentase
(1)	(2)
≤ 20	10,91
21 - 49	68,98
50 - 99	17,58
100 - 149	1,56
150 +	0,97

Sumber : Susenas 2009

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009, kualitas tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif masih kurang baik. Di lihat dari luas lantai hunian, 68,98 persen rumahtangga masih tinggal di rumah yang luas lantainya kurang dari 50 m². Artinya rata-rata luas lantai hunian per kapita akan relatif lebih kecil. Sedangkan persentase untuk luas lantai 50 sampai 99 m² adalah 17,58 persen, 1,56 persen luas lantai 100 – 149 m², dan 0,97 persen luas lantai lebih dari 150 m².

Tabel 5.2 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas Tempat Tinggal, Tahun 2009

Jenis Dinding Terluas	Persentase
(1)	(2)
Tembok	10,59
Kayu	85,49
Bambu	3,48
Lainnya	0,43

Sumber : Susenas 2009

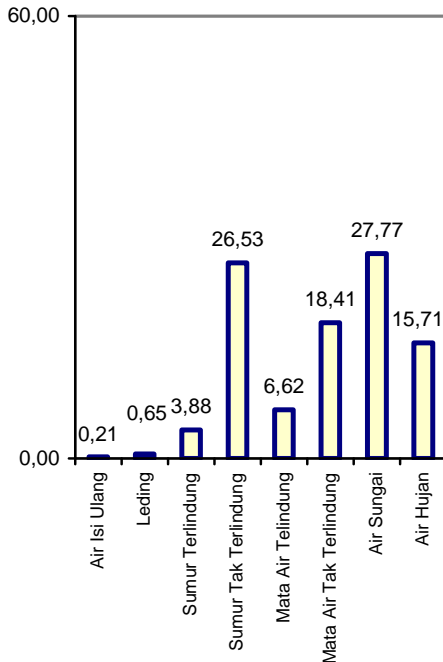
Berdasarkan Tabel 5.2, dapat dilihat persentase mengenai jumlah Rumahtangga menurut jenis dinding terluas. Sebagian besar rumahtangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai menggunakan kayu sebagai dinding terluas tempat tinggal mereka, yaitu mencapai 85,49 persen, sedangkan rumah tangga yang menggunakan tembok dan bambu masing-masing hanya mencapai 10,59 persen dan 3,48 persen.

Tabel 5.3 Persentase Rumahtangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2009

Status Penguasaan Bangunan	Persentase
(1)	(2)
Milik sendiri	93,92
Kontrak	1,61
Sewa	0,75
Dinas	0,65
Rumah milik orang tua/sanak/saudara	2,64
Lainnya	0,44

Sumber : Susenas 2009

Gambar 5.2
Persentase RT Menurut
Sumber Air Minum



Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat mengenai persentase Rumah tangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal. Hampir keseluruhan rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tempat tinggal (rumah) sendiri (93,92 persen), sedangkan banyaknya rumah tangga yang tinggal menumpang di rumah orangtua/sanak/saudara hanya 2,64 persen, sedangkan yang kontrak dan sewa hanya 2,36 persen.

5.2. Sumber Air Minum dan Fasilitas Lainnya

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan pengadaan fasilitas air bersih/minum serta sarana lain untuk meningkatkan kualitas pemukiman penduduk. Pelaksanaan pembangunan ini diupayakan oleh pemerintah untuk dilakukan secara bertahap atau terus menerus.

Berdasarkan Tabel 5.4, dapat dilihat persentase dari jumlah rumah tangga menurut sumber air minum. Mayoritas rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menggunakan sumber air minum dari sungai yaitu mencapai 27,77 persen. Sedangkan 26,53 persen rumah tangga masih menggunakan sumur tak terlindung untuk memenuhi kebutuhan air minumnya.

Tabel 5.4 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber
Air Minum Tahun 2009

Sumber Air Minum	Persentase
(1)	(2)
Air isi Ulang	0,21
Leding	0,65
Sumur terlindung	3,88
Sumur tak terlindung	26,53
Mata air terlindung	6,62
Mata air tak terlindung	18,41
Air sungai	27,77
Air hujan	15,71

Sumber : Susenas 2009

Sementara itu baru sekitar 0,65 persen rumah tangga menggunakan fasilitas ledeng dan hanya 0.21 persen rumah tangga yang membeli air isi ulang. Sedangkan jumlah rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menggunakan fasilitas mata air dan air hujan sebagai sumber air minum masing-masing adalah 18,41 persen dan 15,71 persen.

Tabel 5.5 Persentase Rumahtangga Menurut Jarak Sumber Air dengan Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Tahun 2009

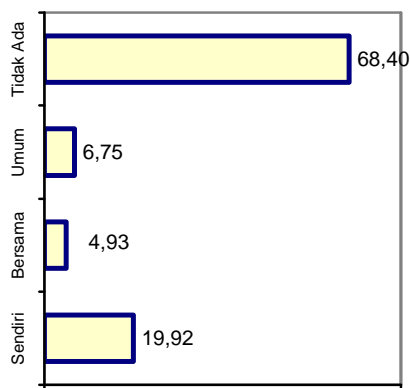
Jarak Sumber Air dengan Tempat Penampungan Kotoran/Tinja	Persentase
(1)	(2)
< 10 m	10,87
>= 10 m	30,07
tidak tahu	59,06

Sumber : Susenas 2009

Jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja dari sumber air minum dan fasilitas tempat buang air besar juga mencerminkan pola sehat suatu bangunan tempat tinggal. Untuk mencerminkan pola hidup sehat tersebut, maka jarak minimal yang dianjurkan untuk tempat penampungan kotoran/tinja dari sumber air minum adalah 10 meter. Berdasarkan hasil Susenas 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, hanya sekitar 30,07 persen rumah tangga yang memastikan bahwa jarak penampungan kotoran/tinja dari sumber air minum lebih dari 10 meter. Kondisi ini tentu saja memerlukan perhatian lebih lanjut oleh Dinas/Instansi terkait setempat demi menjaga lingkungan dan sistem sanitasi yang sehat.

Berdasarkan tabel 5.6, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri hanya 19,92 persen. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan fasilitas bersama dan umum masing-masing hanya 4,93 persen dan 6,75 persen. Kondisi memperhatikan justru terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas

Gambar 5.3 Persentase RT Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar



tempat buang air besar yang mencapai 68,40 persen.

Tabel 5.6 Persentase Rumah tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2009

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Persentase
(1)	(2)
Sendiri	19,92
Bersama	4,93
Umum	6,75
Tidak Ada	68,40

Sumber : Susenas 2009

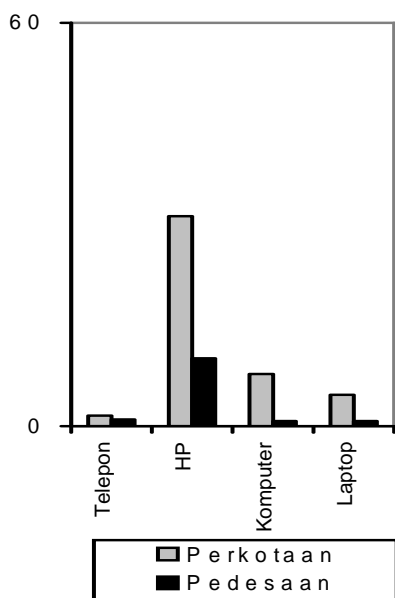
Melihat kondisi ini peran aktif Pemerintah Daerah setempat sangat diperlukan sekali, terutama dalam penyediaan sarana air bersih di Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena ketersediaan air bersih ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, penyuluhan mengenai pola hidup sehat juga harus dilakukan oleh dinas/instansi pemerintah terkait, mengingat faktor kesehatan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai

5.3. Listrik, Komunikasi dan Informasi

Fasilitas sumber penerangan (listrik), komunikasi dan informasi pada masa sekarang ini turut memberikan kontribusi pada tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang sudah menerapkan serta memanfaatkan fasilitas ini secara pasti akan lebih mudah dan cepat dalam memperoleh informasi. Masyarakat tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, dimana dan kapan kejadian itu terjadi.

Listrik sebagai fasilitas sumber penerangan secara pasti dapat mendukung proses penyebaran informasi, khususnya yang berasal dari media elektronik seperti Televisi dan Radio, dan sebagai tindak lanjut dari proses penyebaran informasi tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat melalui berbagai

Gambar 5.4
Persentase RT Menurut
Fasilitas Teknologi
Komunikasi dan
Informasi



sarana komunikasi, seperti Telepon, Handphone, Internet, dan lain sebagainya. Tingkat kemajuan suatu masyarakat dapat juga dilihat dari ketersediaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ini.

Tabel 5.7 Persentase Rumahtangga Menurut Fasilitas Sumber Penerangan (Listrik) Tahun 2009

Fasilitas Sumber Penerangan	Persentase
(1)	(2)
Listrik PLN	18,06
Listrik Non PLN	11,62
Petromak/Aladin	13,56
Lentera/Senter/Obor	50,28
Lainnya	6,49

Sumber : Susenas 2009

Jumlah rumah tangga yang sudah menggunakan fasilitas sumber penerangan listrik di Kabupaten Kepulauan Mentawai baru mencapai 29,68 persen, dimana 18,06 persen merupakan Listrik PLN, dan 11,62 persen Listrik Non PLN. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dari sepertiga masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang baru merasakan fasilitas sumber penerangan listrik, sedangkan sisanya sebanyak 70,32 persen hanya menggunakan lampu petromak, lentera, obor dan lainnya sebagai satu-satunya sumber penerangan. Hal ini tentu saja akan berdampak langsung terhadap terhambatnya kelangsungan penyebaran informasi, khususnya informasi yang berasal dari media elektronik.

Tabel 5.8 Persentase Rumahtangga Menurut Fasilitas Teknologi Komunikasi dan Informasi Tahun 2009

Daerah	Fasilitas Komunikasi Dan Informasi			
	Telepon	HP	Komputer	Laptop
(1)	(2)	(3)	(4)	
Perkotaan	1,59	31,22	7,77	4,66
Pedesaan	1,04	10,13	0,78	0,78

Sumber : Susenas 2009

Ketersediaan sarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mengalami peningkatan yang signifikan dan tidak merata untuk seluruh fasilitas komunikasi dan informasi tersebut.

Berdasarkan tabel 5.8 terlihat bahwa fasilitas tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat di perkotaan saja, sedangkan untuk masyarakat pedesaan masih sangat minim. Masyarakat pedesaan yang bisa menikmati fasilitas teknologi komunikasi dan informasi tersebut itupun yang berada tidak jauh dari daerah perkotaan. Tercatat hanya 1,6 persen rumah tangga di daerah perkotaan telah memiliki fasilitas komunikasi telepon dan 31,2 persen sudah menggunakan fasilitas telepon seluler (Handphone), sedangkan rumah tangga yang tinggal di perkotaan dengan fasilitas komputer mencapai 7,8 persen dan 4,7 persen sudah menikmati fasilitas computer jinjing atau laptop. Sementara itu masyarakat pedesaan yang dapat menikmati layanan telepon rumah sedikit sekali, yaitu hanya 1,0 persen.

Kondisi yang sama juga terlihat pada fasilitas ketersediaan Handphone dan Komputer. Khusus untuk handphone, rumah tangga di daerah pedesaan yang menggunakan fasilitas ini sudah mencapai 10,1 persen.

Berdasarkan kondisi diatas terlihat bahwa, daerah perkotaan memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, meskipun masih cukup terbatas dan belum menyeluruh. Disini terlihat masih minimnya sarana komunikasi dan informasi di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga akan berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai itu sendiri di masa mendatang.

BAB VI. PENGELUARAN & KONSUMSI



6.1 Komposisi Penduduk Menurut
Pengeluaran

6.2 Pola Pengeluaran Rumah
Tangga

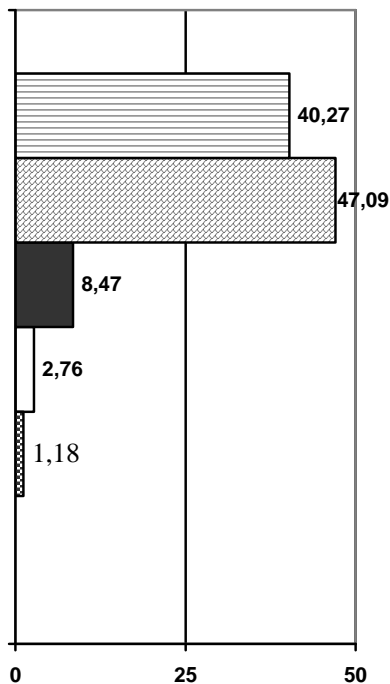
Kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh, semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka pendekatan yang sering digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah melalui survei-survei yang menggunakan pendekatan pengeluaran rumahtangga.

Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk maka semakin tinggi pula tingkat persentase pengeluaran untuk bukan makanan (persentase pengeluaran untuk makanan semakin rendah). Di negara-negara yang telah maju dengan tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi, pola konsumsi masyarakatnya cenderung kepada kebutuhan bukan primer atau kebutuhan akan barang dan jasa di luar makanan.

6.1 Komposisi Rumahtangga Menurut Pengeluaran

Pengeluaran rumahtangga merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Pada tahun 2008, sebagian besar rumah tangga Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk pada golongan pengeluaran antara 500.000 hingga 1.000.000 rupiah sebulan, yaitu sebesar 47,09 persen dari seluruh rumah tangga. Hal ini tentu saja jauh berbeda dengan keadaan golongan pengeluaran pada tahun 2008 (data Susenas 2008), dimana terjadi peningkatan pada golongan pengeluaran pengeluaran antara 500.000 hingga 1.000.000 rupiah sebulan dan diatas 1.000.000 rupiah perbulan. Peningkatan ini juga menggambarkan adanya perbaikan pendapatan rumah tangga di Kepulauan Mentawai.

Gambar 6.1
Persentase Penduduk
Menurut Golongan
Pengeluaran Sebulan



■ <150.000	▣ 150.000-199.999
□ 200.000-299.999	■ 300.000-499.999
▣ 500.000-999.999	□ 100.0000 +

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Sebulan, Tahun 2009

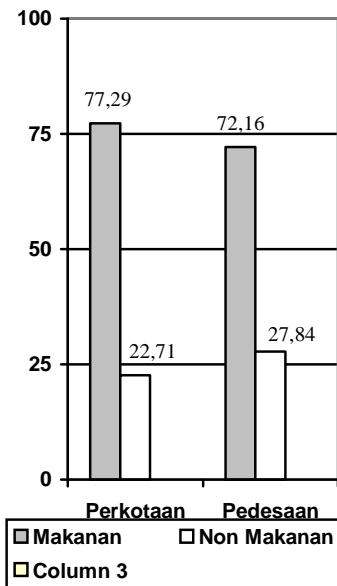
Golongan Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan (Rp)	Persentase
(1)	(2)
<150.000	0,00
150.000 – 199.999	1,18
200.000 – 299.999	2,76
300.000 – 499.999	8,47
500.000 – 999.999	47,09
1.000.000 +	40,27
Total	100,00

Sumber : Susenas 2009

Jika dilihat secara nominal, komposisi pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 6.1. Mayoritas rumah tangga memiliki golongan pengeluaran 500.000 – 999.999 rupiah sebulan atau mencapai 46,95 persen. Jumlah rumah tangga yang memiliki golongan pengeluaran 300.000 sampai 499.999 rupiah sebulan mencapai 8,47 persen, sedangkan yang berada pada golongan pengeluaran diatas 1.000.000 rupiah sebulan adalah 40,27 persen.

Hal yang cukup menarik terjadi pada golongan pengeluaran perkapita dibawah 150.000 rupiah sebulan. Sejak tahun 2008 sudah tidak ada lagi rumah tangga dengan golongan pengeluaran dibawah 150.000 rupiah perbulan, dikarenakan jumlah nilai uang tersebut dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga selama sebulan. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan terjadinya kenaikan harga (inflasi) barang yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir, baik untuk bahan makanan maupun bukan makanan.

Gambar 6.2
Persentase Rata-Rata
Pengeluaran Rumah
Tangga Sebulan
Menurut Jenis
Pengeluaran



6.2. Pola Pengeluaran Rumah Tangga

Secara umum pola pengeluaran rumahtangga dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pada umumnya di negara-negara berkembang pola pengeluaran penduduknya terkonsentrasi pada pengeluaran untuk makanan, bahkan mencapai lebih separuh total pengeluaran. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka pola pengeluarannya akan lebih banyak pada pengeluaran untuk bukan makanan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pergeseran pola pengeluaran masyarakat, dari lebih banyak pengeluaran untuk makan kearah pengeluaran untuk bukan makan. Hal ini disebabkan karena pengeluaran untuk makan relatif stabil setiap bulannya, sehingga peningkatan pendapatan cenderung untuk meningkatkan pengeluaran bukan makan atau ditabung. Sehingga pola pengeluaran dapat dilihat sebagai salah satu indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dan perubahan komposisinya sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Namun demikian, peningkatan pola pengeluaran untuk bukan makanan tidak selalu dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk, karena hal tersebut hanya dilihat secara nilai nominalnya saja, tanpa melihat adanya kenaikan harga (inflasi). Sejalan dengan hal diatas, pola pengeluaran di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih terkonsentrasi pada jenis pengeluaran untuk makanan. Seperti terlihat pada tabel 6.2. rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk jenis pengeluaran makanan lebih dari separuh pengeluaran total, yaitu mencapai 73,25 persen, sedangkan sisanya 26,75 persen merupakan jenis pengeluaran untuk non makanan.

Tabel 6.2 Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Daerah, Tahun 2009

Daerah	Jenis Pengeluaran		Total
	Makanan	Bukan Makanan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	77,29	22,71	100.00
Pedesaan	72,16	27,84	100.00
Kep. Mentawai	73,25	26,75	100.00

Sumber : Susenas 2009

Jika dilihat dari komposisi daerah tempat tinggal, baik untuk daerah perkotaan maupun pedesaan sama-sama menggunakan lebih dari separuh total pengeluaran untuk makanan, masing-masing 77,29 persen untuk daerah perkotaan dan 72,16 persen untuk daerah pedesaan. Sedangkan persentase untuk jenis pengeluaran bukan makanan di daerah perkotaan dan pedesaan masing-masing hanya 22,71 persen dan 27,84 persen.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

<http://mentawaikab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai